

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sejak dipindahkannya pusat kekuasaan dan pemerintahan serta ibukota Kabupaten Bandung dari Karapyak, Citeureup Dayeuhkolot ke wilayah Kota Bandung yang berpusat di pendopo (sekarang) pada tahun 1810<sup>1</sup> oleh R. Adipati Wiranatakusumah II (Dalem Kaum, 1794-1829) atas perintah dari Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melalui suratnya tertanggal 25 September 1810.<sup>2</sup> Perkembangan Kota Bandung sangat pesat, tumbuh menjadi kota besar dengan segala permasalahan dan dinamika suatu kota dengan penduduknya. Letaknya yang sangat strategis menghubungkan antara wilayah Priangan Barat dengan Priangan Timur, serta menghubungkan ibukota Hindia Belanda di Batavia dengan wilayah Jawa bagian tengah menjadikan Bandung cepat berkembang. Tentu saja, peranan pemimpin pemerintahan sangat dominan dalam memajukan suatu wilayahnya yang disebut *Afdeling* Priangan dipimpin seorang bupati.

Bupati khususnya di Priangan dan umumnya di pulau Jawa mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting serta unik dalam penyesuaian budaya sendiri terhadap modernisasi yang dimunculkan oleh pemerintah kolonial.

---

<sup>1</sup>Tini Kartini dan Aam Taram, *R A A H. M. Wiranatakusumah: Sekelumit Kenangaan*, (Bandung: Yayasan Wiranatakusumah, 2000), hal. 4.

<sup>2</sup>Her Suganda, *Jendela Bandung*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 56.

kedudukan bupati sebagai penguasa daerah digunakan pemerintah kolonial sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat pribumi dalam melaksanakan

